

Judul : Penangkapan Ikan Terukur : Awas, Nelayan Kecil Jadi Tersingkirkan
Tanggal : Jumat, 15 Maret 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Penangkapan Ikan Terukur

Awis, Nelayan Kecil Jadi Tersingkirkan

ANGGOTA Komisi IV DPR Yohanis Fransiskus Lema mempertanyakan kelanjutan kebijakan Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor kelautan ini dinilai mengancam kehidupan nelayan kecil.

Yohanis mengatakan, kinerja KKP sepanjang tahun 2023 cukup baik dalam membantu masyarakat kecil, terutama para nelayan dan juga para pembudidaya ikan. Untuk itu, dia berharap pada 2024 ini, KKP tetap komitmen untuk tidak merelokasi aspirasi masyarakat tahun ini.

"Pelaku utama kelautan dan perikanan ini sangat membutuhkan bantuan dari negara. Dan KKP diharapkan tetap hadir memberikan bantuan bagi para nelayan, para pembudidaya ikan dan seterusnya," kata Yohanis dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Yansi-sapaan Yohanis Fransiskus Lema, mempertanyakan kebijakan KKP terkait PIT ini.

"Pak Menteri, terkait dengan program penangkapan ikan terukur, pertanyaan kami singkat, ini sebenarnya jadi dijalankan atau tidak?" tanyanya.

Jika kebijakan ini sudah berjalan, dia meminta KKP dapat mempertimbangkan aspek kesiapan infrastruktur pelabuhan perikanan. Hal ini cukup penting agar stakeholder yang terlibat di dalamnya, yakni nelayan dan juga pelaku usaha itu tidak dirugikan.

Selain itu, penerapan PIT juga harus mempertimbangkan aspek konservasi laut, habitat dan ekosistem laut dan wilayah pesisir. Juga perlindungan terhadap nelayan kecil tradisional sehingga kebijakan ini tidak menjadi media untuk menyingkirkan para nelayan kecil dan tradisional.

"Kita berharap kebijakan ini tidak hanya memberikan profit bagi para pengusaha besar, tetapi juga benefit bagi para pelaku usaha terutama nelayan kecil tradisional," harapnya.

Anggota Komisi IV DPR Suhardi Duka mengapresiasi meningkatnya indeks kepatuhan usaha kelautan dan perikanan menjadi 97,96 persen di tahun 2023 ini. Capaian ini menunjuk-



Yohanis Fransiskus Lema

kan kinerja KKP semakin baik, dan juga menunjukkan bahwa para pengusaha dan para nelayan kita sudah semakin patuh terhadap aturan yang dibuat oleh Pemerintah.

"Saya hanya ingin minta kepada Dirjen Pengawasan KKP untuk nelayan rakyat, bukan pengusahanya. Kalau pengusahanya saya tidak bela, tapi nelayan rakyatnya, jangan langsung ditangkap pak. Tapi dipersuasi, disosialisasi dulu. Apabila ada keterlambatan pengurusan kapalnyanya dan lain sebagainya,"

wantinya.

Suhardi juga menilai, program Kampung Nelayan Modern yang dijalankan KKP sudah berjalan baik. Untuk itu, dia mendorong agar program ini dapat menjadi role model di setiap provinsi. Supaya Pemerintah Daerah, bisa mengikuti bagaimana pengembangan nelayan di desa-desa nelayannya masing-masing.

Suhardi juga mengatakan, program pengadaan kapal nelayan modern juga berjalan cukup baik. Program pengadaan kapal modern ini bisa jadi role model atau menjadi tempat pelatihan bagi nelayan-nelayan tradisional yang ada di provinsi.

"Kalau dikasih satu jenis kapal yang kapasitas 30 sampai dengan 40 GT, bagi tiap-tiap provinsi untuk dijadikan," harapnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memastikan penerapan kebijakan PIT belum dilaksanakan.

"Sampai hari ini kita sedang progres untuk pelaksanaan. Kita masih tunda sampai hari ini," katanya.

Trenggono mengatakan, penundaan ini karena pihaknya masih tengah menyiapkan pendukungnya. Salah satunya, pem-

buatan modeling dari program ini, termasuk zonanya dan infrastrukturnya. Diakuinya, ada beberapa kendala dalam pelaksanaan PIT ini seperti bahan bakar.

Soal penyediaan bahan bakar ini sebetulnya ada dua harga, yakni, harga yang benar-benar untuk nelayan dan harga yang diperuntukkan untuk pengusaha penangkapan.

"Nah, yang kita dorong untuk PIT itu sebetulnya lebih kepada pengusaha penangkapan. Yang nelayan itu justru kita ingin jadikan mereka masyarakat produktif," katanya.

Dia ingin untuk nelayan nanti, tersedia Kampung Nelayan Modern, seperti kampung nelayan modern di Sambar Binyeri, Biak Numfor, Papua, yang baru-baru ini diresmikan Presiden Jokowi. Pihaknya merancang akan ada 10 kampung modern untuk mendukung PIT ini.

"Kalau di Jawa, tidak sama seperti di wilayah timur. Wilayah timur nelayan kecilnya banyak. Maka kita usahakan fokus ke sana. Kita kasih fasilitas semua untuk kepentingan mereka. Contohnya soal ketersediaan es dan cold storage, serta bantuan kapal," jelasnya. ■ KAL